

**ANALISIS KESIAPAN E-GOVERNMENT DALAM
MENDUKUNG SMART GOVERNANCE
DI KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

Muh. Hidayat Basri
NPP31.0956

*Asdaf Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat
Program Studi Teknologi Rekayasa Informasi Pemerintahan*

Email: dayatji1234@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Agung Nurrahman, S.STP., M.PA

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): *This research is worthwhile and need to be carried out because the first of the results of the literary study has not yet been a study that specifically deals with the locus and focus of this. Second, there was a rather drastic drop in the SPBE index in the district of Polewali Mandar in 2020-2021. Third, there is no Smart City policy in Polewali Mandar. Fourthly, some government website applications are inaccessible. Purpose:* This study aims to analyze and describe the preparedness of e-government in the government of the Polewali Mandar district and how the implementation of Smart Governance in the district. **Method:** *This research uses Quasi Qualitative method. Data collection techniques using interviews, observations and documentation techniques. This study uses two theories as an analysis tool namely, firstly, the theory of e-government readiness (Indrajit, 2005), and secondly, Smart Governance theory. (Giffinger, 2007). Result:* The results of this research are The Mandar Polewali district government is judged ready to implement and develop e-government in accordance with the six dimensions that overall has gone well even though on telecommunications infrastructure is still not maximum. As far as Smart Governance in Polewali Mandar is concerned, it is not fully optimized, due to the lack of public participation, the incomplete infrastructure of the Kominfo-SP command center, and the policy or masterplan of Smart cities as a foundation in creating the unavailable Smart governance. **Conclusion:** Although there is no Smart City policy or masterplan, the Polewali Mandar district government has shown various efforts and continues to work towards creating Smart Governance. It is characterized by the presence of various applications or services of government information systems or e-government, public services that are provided either in-person, ball pickup, or online services, involving other stakeholders in any decision-making for the development of Polewali Mandar, and has regulations in developing e-government or electronic-based governance systems.

Keywords: *Readiness, Smart Governance and E-government*

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Penelitian ini layak dan perlu dilakukan karena pertama dari hasil kajian literatur belum terdapat penelitian yang secara spesifik membahas lokus dan fokus ini. Kedua, terjadi penurunan indeks SPBE yang cukup drastis di kabupaten Polewali Mandar pada tahun 2020-2021. Ketiga, belum ada kebijakan *Smart City* di Polewali Mandar. Keempat, beberapa aplikasi website pemerintah yang tidak bisa diakses. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan terkait kesiapan *e-government* di pemerintah kabupaten Polewali Mandar dan bagaimana penerapan *Smart Governance* di kabupaten Polewali Mandar. **Metode:** Metode yang digunakan ialah *Quasi Qualitative*. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan dua teori sebagai alat analisis yaitu, pertama, teori kesiapan *e-government* (Indrajit, 2005), dan yang kedua, teori *Smart Governance* (Giffinger, 2007). **Hasil/Temuan:** Pemerintah kabupaten Polewali Mandar dinilai siap untuk menerapkan dan mengembangkan *e-government* sesuai dengan enam dimensi yang secara keseluruhan telah berjalan dengan baik meskipun pada infrastruktur telekomunikasi masih belum maksimal. Adapun, *Smart Governance* di Polewali Mandar belum sepenuhnya optimal, karena kurangnya partisipasi masyarakat, infrastruktur command center dinas Kominfo-SP yang belum tersedia, dan kebijakan atau masterplan *Smart City* sebagai fondasi dalam menciptakan *Smart Governance* yang belum tersedia. **Kesimpulan:** Meskipun belum ada kebijakan atau masterplan *Smart City*, namun pemerintah kabupaten Polewali Mandar telah menunjukkan berbagai upaya dan terus berusaha dalam menciptakan *Smart Governance*. Hal ini ditandai dengan adanya berbagai aplikasi atau layanan sistem informasi pemerintahan atau *e-government*, layanan publik yang disediakan baik secara langsung, jemput bola, maupun layanan online, melibatkan stakeholder lain dalam setiap pengambilan keputusan untuk pembangunan Polewali Mandar, dan mempunyai regulasi dalam mengembangkan *e-government* atau sistem pemerintahan berbasis elektronik.

Kata kunci: Kesiapan, *Smart Governance* dan *E-government*

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Smart Governance sebagai perwujudan dari Good Governance menjadi salah satu unsur terpenting dalam suatu badan atau instansi pemerintahan yang dikembangkan berdasarkan fungsi teknologi informasi agar dapat di akses oleh yang berkepentingan secara efektif dan efisien (Wahyuni, et. al. 2021). Implementasi tata kelola cerdas ialah dengan memanfaatkan teknologi informasi kedalam kehidupan sehari-hari dan sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan berbasis elektronik atau *e-government* ialah pemanfaatan teknologi informasi pada sistem pemerintahan contohnya seperti aplikasi-aplikasi ataupun layanan pemerintah yang bersifat online.

E-government menjadi pondasi yang penting untuk berevolusi menuju smart governance sebagai salah satu dimensi *Smart City* (Pereira, et. al. 2018). Selain itu, *e-government* mampu menghadirkan pelayanan yang dapat mengikuti perkembangan zaman serta fleksibel dan menciptakan pelayan dalam pemerintah semakin efisien serta efektif (Ridhawati, Eka, et al. 2019). *E-government* dan *Smart City* adalah dua konsep yang berbeda. Perbedaan yang paling terlihat terletak pada ruang lingkup pelaksanaannya, dimana *e-government* berada pada lingkup organisasi pemerintah, sedangkan lingkup *Smart City* adalah perkotaan. Namun kedua konsep tersebut memiliki kesamaan dalam penggunaan dan pemanfaatan TIK yang bertujuan untuk memberikan nilai lebih (*value added*) kepada warga masyarakat (Gil-garcia, J. R. 2012).

Menurut Nento dan Selo (2017) mengungkapkan bahwa keberhasilan inisiatif *e-government* bergantung pada sejauh mana institusi pemerintah mempersiapkan lembaganya untuk menyikapi kelemahan-kelemahan yang ada. Oleh karena itu, mengukur kesiapan pemerintah adalah hal yang perlu dilakukan sebelum ataupun saat menerapkan *e-government* sebagai bahan evaluasi bagi instansi pemerintah.

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

SPBE merupakan suatu sistem tata kelola pemerintah yang memanfaatkan teknologi informasi secara menyeluruh dan terpadu dalam pelaksanaan administrasi pemerintahan dan penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan pada suatu instansi pemerintahan (spbe.go.id). Salah satu bentuk dukungan implementasi *Smart Governance* ialah dengan melihat kualitas SPBE yang ada. Ada beberapa domain dalam penilaian SPBE yaitu domain kebijakan internal SPBE, domain tata kelola SPBE, domain manajemen SPBE, dan domain layanan SPBE. Namun indeks SPBE pemerintah kabupaten Polewali Mandar khususnya pada tahun 2021 mengalami penurunan drastis dari tahun sebelumnya yakni 3,30 turun ke 2,71 (Berdasarkan KEPMENPANRB No. 1503 Tahun 2021).

Selain indeks SPBE diatas, penelitian ini sangat layak untuk diteliti karena berdasarkan hasil pencarian penulis di berbagai kajian literatur belum ada penelitian yang membahas pada lokus dan fokus yang sama. Penulis memperoleh informasi dari internet bahwasananya kabupaten Polewali Mandar sampai saat ini masih proses penancangan *Smart City* (sulbar.tribunnews.com). Penulis juga mencari informasi dari RPJMD kabupaten Polewali Mandar tahun 2019-2024, namun ternyata memang belum ada kebijakan atau master plan *Smart City* di kabupaten Polewali Mandar. Hal ini tentunya menjadi tanda tanya penulis dan perlu untuk didiskusikan oleh pemerintah agar kedepannya menjadi bahan pertimbangan untuk mempercepat realisasi konsep kota cerdas atau smart city. Penulis juga menemukan beberapa sistem informasi atau layanan pemerintah yang mengalami kendala dalam mengaksesnya.

1.3 Penelitian Terdahulu

Penulis terinspirasi oleh beberapa penelitian yang telah dilakukan. Penelitian pertama yaitu oleh Bhakti Nur Avianto, Marry Ismowati & Nanda Amelia yang berjudul *Implementation E-government in supporting of online-based Service Quality and Accessibility* (2022), hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah perlu beradaptasi dengan cepat untuk mendukung kebutuhan rakyat dengan cara yang lebih efektif dan efisien. Yaitu dengan menerapkan sistem *e-government* atau pemerintah yang menggunakan teknologi untuk melayani masyarakat secara transparan, efektif, efisien dan bertanggung jawab. pemerintah perlu lebih memperhatikan untuk memantau kemampuan sumber daya manusia atau ASN untuk lebih konsisten dengan layanan berbasis *e-government*. Jika kemampuan ASN masih tidak dapat memanfaatkan sistem *e-government* dengan benar, maka dana yang dihabiskan akan sia-sia. Selain pembiayaan infrastruktur digital, ada hal-hal yang lebih mendesak dari itu, yaitu perbaikan jalan yang rusak di daerah-daerah yang tentu saja memberikan kepuasan langsung kepada masyarakat daripada menumpahkan dana infrastruktur digital ke dalam ketersediaan sumber daya manusia itu sendiri yang rendah atau belum dapat menerapkan e-pemerintah atas pemerintah. Penelitian kedua yaitu oleh Dionisia Mariani Randang, William Djani, Laurensius Say Ran yang berjudul *Analisis Kesiapan Pemerintah Kabupaten Manggarai Dalam Penerapan E-government* (2020), menemukan bahwa secara keseluruhan, tingkat kesiapan Pemerintah Kabupaten Manggarai dalam penerapan *e-government* tergolong rendah, didasarkan pada belum ada kerangka hukum yang mengatur, rendahnya komitmen pemerintah, belum maksimalnya pemanfaatan TIK, dan belum memadainya SDM, sarana dan prasarana pendukung serta anggaran *e-government* di kabupaten Manggarai. Penelitian ketiga, yaitu oleh Wahed Waheduzzaman & Shah Jahan Miah yang berjudul *Readiness assessment of e-government: a developing country perspective in bangladesh* (2015), menemukan bahwa implementasi *e-government* di Bangladesh tidak berjalan mulus akibat sikap aparat pemerintah Bangladesh yang birokratis dan tidak menginginkan partisipasi publik dalam kinerja pemerintahan. Peneliti ini menyimpulkan bahwa aspek kolaboratif dan partisipasi masyarakat merupakan faktor yang sangat signifikan untuk mewujudkan keberhasilan *e-government*. Penelitian keempat, yaitu oleh Juliasti Surdin yang berjudul *Analisis Kelayakan Implementasi E-government Dalam Pelayanan Publik Di Bidang Keagrariaan Di Kabupaten Pinrang* (2016) menemukan bahwa Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kelayakan implementasi *e-government* pada Kantor Pertanahan Kabupaten Pinrang belum optimal, hal ini disebabkan dalam organisasi Kantor Pertanahan Kabupaten Pinrang belum didukung adanya peraturan pemerintah daerah tentang penerapan *e-government* secara rinci walaupun kesiapan Sumber Daya Manusia sudah mendukung serta kesiapan Infrastruktur telah memadai. Penelitian yang kelima, oleh Ema Amalia dan Evi Lorita yang berjudul *Analisis Evaluasi Pengembangan E-government di Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik*

Provinsi Bengkulu (2022) dimana hasil penelitian menunjukkan bawa: (1) Pemerintah Provinsi Bengkulu telah melakukan persiapan dalam pengembangan *e-government* yakni dengan membuat website dengan nama bengkuluprov.go.id yang merupakan salah satu portal website yang berfungsi sebagai sarana informasi, komunikasi dan transaksi antara masyarakat dan pemerintah yang dapat dilakukan melalui internet. (2) Pada tahap pematangan dalam pengembangan *E-government* di Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bengkulu telah melakukan dua hal yakni pembuatan situs informasi publik interaktif dan mudah untuk diakses, dan pembuatan antar muka keterhubungan dengan lembaga lain atau aplikasi yang secara tidak langsung terhubung/link dengan website yang dimiliki oleh lembaga lain di pemprov Bengkulu. (3) Website bengkuluprov.go.id merupakan aplikasi yang dikembangkan oleh Pemerintah Provinsi Bengkulu sebagai bentuk sarana komunikasi dan informasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat Provinsi Bengkulu. (4) Website bengkuluprov.go.id merupakan aplikasi pelayanan oleh Pemerintah Provinsi Bengkulu kepada masyarakat Provinsi Bengkulu. Sehingga fungsi pelayanan pemberian informasi secara Government to Government (G2G), Government to Business (G2B), dan Government to Citizen (G2C) dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Bengkulu. Penelitian yang keenam oleh Syarifah, Dafrin Muksin, dan Muhammad Fadlan yang berjudul Analisis Faktor Implementasi *E-government* Di Kabupaten Jayawijaya Papua (2023) dimana ditarik kesimpulan bahwa implementasi *e-government* di Kabupaten Jayawijaya Papua masih kurang baik. Hal tersebut berdasarkan olahan data deskriptif dilihat dari 5 indikator seperti kemudahan akses, selalu tersedia, keamanan dan kepercayaan, integrasi, dan biaya. Selanjutnya implementasi *e-government* di Kabupaten Jayawijaya terdapat 4 (empat) faktor pendukung yaitu semakin maju dan berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi yang ada di kabupaten Jayawijaya, adanya peningkatan penggunaan internet, adanya berbagai ragam media informasi, dan kesadaran masyarakat akan pentingnya informasi. Wawasan dan pengetahuan masyarakat tentang alat komunikasi telah meningkat dan 6 (enam) faktor penghambat yaitu luas wilayah Kabupaten Jayawijaya yang belum terjangkau jaringan. Kemajemukan tingkat Pendidikan dan pengetahuan masyarakat tentang informasi dan komunikasi. Lemahnya jaringan layanan informasi di masyarakat kabupaten Jayawijaya. Masih ada beberapa daerah yang belum terjangkau layanan komunikasi. Adaptasi perkembangan teknologi informasi dan komunikasi masih lambat. Terakhir, kurangnya konsistensi pemerintah dalam penerapan layanan digital. Penelitian ketujuh oleh Sarika Afrizal, Nashrul Hakiem, Dana Indra Sensuse yang berjudul Analisis Kesiapan Implementasi *E-government* Pada Direktorat Jendral Penyelenggaraan Haji Dan Umrah Kementerian Agama Republik Indonesia. Dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa Penelitian ini mengajukan faktor kesiapan dalam implementasi *e-government* pada Kementerian Agama yang ada di Indonesia melalui indikator-indikator yang dinilai oleh para ahli di

bidang *e-government*. Pada penelitian ini indikator-indikator tersebut dikelompokkan berdasarkan dimensi-dimensinya di antaranya ialah Dimensi Teknologi, Dimensi Organisasi, Dimensi Lingkungan, dan Dimensi Orang (Pengguna atau Sumber Daya Manusia). Penelitian kedelapan oleh Subhan dan Arif Budy Pratama yang berjudul Kesiapan Desa dalam Penerapan *E-government* (Studi Perbandingan di Desa Semaya dan Desa Pegirangan Kabupaten Pematang Jaya) dimana hasil penelitian menunjukkan bahwa aspek sistem data, landasan hukum, kelembagaan, sumber daya manusia, infrastruktur teknologi serta kepemimpinan dan pemikiran strategis berperan dalam kesiapan penerapan *e-government*. Beberapa implikasi kebijakan dapat dirumuskan untuk meningkatkan kesiapan Pemerintah Desa dalam implementasi *e-government*.

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni Analisis Kesiapan *E-government* dalam mendukung *Smart Governance* di Kabupaten Polewali Mandar yang tentunya berbeda dengan penelitian sebelumnya yang telah dipaparkan. Penelitian ini dilakukan di Dinas Kominfo-SP, Bappeda-Litbang dan Disdukcapil kabupaten Polewali Mandar.

1.5 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan terkait kesiapan *e-government* di pemerintah kabupaten Polewali Mandar dan bagaimana penerapan *Smart Governance* di kabupaten Polewali Mandar.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan *Quasi-Qualitative* dimana data hasil penelitian yang diperoleh menggunakan teori sebagai dasar pemikiran dari awal penelitian atau alat analisis di lapangan. Burhan Bungin (2020) menjelaskan bahwa pilihan terkait metode penelitian yang diterapkan adalah hasil dari paradigma yang dipilih oleh peneliti, dimana desain kuasi kualitatif berangkat dari paradigma postpositivisme, yang berarti kebenaran objektif harus melalui verifikasi atau dibuktikan secara induktif. Selanjutnya, postpositivisme menolak penggunaan satu teknik dalam pengumpulan data, melainkan bermacam-macam metode melalui triangulasi yang meliputi metode, sumber data, peneliti dan teori. Peneliti mengumpulkan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Dalam melakukan pengumpulan data kualitatif, penulis melakukan wawancara secara mendalam terhadap 10 orang informan yang terdiri dari Kepala Bappeda Litbang, Kadis Kominfo, Sekdis Kominfo, Kabid TIP Kominfo, Kabid Informasi dan komunikasi publik Kominfo, Pranata komputer bidang TIP Kominfo, Kabid Pengelolaan informasi dan Adm. Dukcapil, dan Pranata Komputer Bidang Pengelolaan Informasi dan Adm. Dukcapil serta 2 masyarakat mahasiswa. Adapun analisisnya menggunakan teori kesiapan *e-government* yang digagas oleh Indrajit (2005) dan teori *Smart Governance* menurut Giffinger (2007).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Kesiapan *E-government* di Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar

Dalam konteks *e-government*, kesiapan pelaksanaan *e-government* menunjukkan kemampuan lembaga pemerintah dalam menggunakan TIK untuk mengubah layanan publik yang awalnya bersifat konvensional menjadi layanan publik berbasis teknologi. Untuk mewujudkan hal tersebut, penulis menggunakan teori kesiapan *e-government* dari Indrajit (2005) yang memiliki enam dimensi yang mempengaruhi kesiapan *e-government*. Enam dimensi tersebut antara lain Infrastruktur Telekomunikasi, Tingkat konektivitas dan penggunaan TI oleh Pemerintah, Kesiapan SDM di pemerintah, Ketersediaan anggaran, Perangkat hukum, dan Perubahan paradigma.

3.1.1 Infrastruktur Telekomunikasi

1) Komputer

Dinas Kominfo-SP sebagai *leading sector* tentunya mempunyai peran penting dalam pengembangan *e-government* oleh karena itu media elektronik seperti komputer sangat dibutuhkan dalam hal ini. Kondisi komputer di Dinas Kominfo Kabupaten Polewali Mandar saat ini sudah memadai. Komputer yang digunakan memiliki spesifikasi yang baik dan mampu mengakses fitur-fitur terbaru untuk mendukung kegiatan penyelenggaraan *e-government*. Selain itu, jumlah komputer yang tersedia juga dinilai cukup, dimana seluruh staf atau pegawai telah dilengkapi dengan komputer dinas yang digunakan sehari-hari untuk bekerja.

2) Jaringan

Kondisi jaringan di Polewali Mandar sebesar 61% daerahnya sudah memiliki akses jaringan yang baik bagian perkotaan namun masih terdapat di beberapa desa atau kelurahan maupun perkampungan yang masih tergolong blank-spot ataupun belum tersentuh jaringan telekomunikasi sama sekali yang artinya untuk indikator jaringan menunjukkan hasil belum tercapai secara maksimal.

3) Infrastruktur

Dinas Kominfo Kabupaten Polewali Mandar telah membuat kemajuan yang signifikan dalam mengembangkan infrastruktur *e-government* secara keseluruhan. Berbagai Infrastruktur IT yang telah dibangun akan tetapi masih belum ada infrastruktur fisik penunjang seperti bangunan atau ruang *command center* sehingga pada indikator ini penulis menilai belum tercapai maksimal. Akan tetapi hal tersebut bukan menjadi alasan untuk tidak meningkatkan kualitas layanan publik. Dengan segala upaya, pihak dinas kominfo-SP yakin bahwa infrastruktur yang ada saat ini dinilai cukup memadai untuk mendukung keberhasilan *e-government* di kabupaten Polewali Mandar.

3.1.2 Tingkat Konektivitas dan Penggunaan TI oleh Pemerintah

1) Pelayanan

Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar telah memanfaatkan TIK untuk bidang pelayanan. Berbagai aplikasi atau layanan pemerintah yang telah diterapkan kini dikembangkan oleh pihak kominfo sendiri sebagai wujud pemanfaatan TIK

sehingga hal ini menjadi modal dalam kesiapan *e-government* di pemerintah kabupaten Polewali Mandar. Oleh karena itu, hasil pada indicator ini dapat dikatakan sudah tercapai dengan baik.

2) Pemberdayaan

Pemberdayaan teknologi informasi dalam hal ini ialah pemberdayaan *e-government* oleh Dinas Kominfo-SP telah terlaksana dengan baik. Dimana pemerintah berhasil memanfaatkan IT dengan mengintegrasikan Teknologi Informasi kedalam sistem pemerintahan dan proses pelayanan kepada masyarakat. Tidak sampai disitu, dinas kominfo-sp sebagai *leading sector* juga melakukan pelatihan dan pendampingan terkait pemanfaatan IT yang dilaksanakan secara rutin.

3) Pembangunan

Pembangunan penerapan *e-government* di Dinas Kominfo-SP Polewali Mandar berjalan dengan baik, dimana telah mengalami perkembangan yang cukup signifikan yang dapat dibuktikan dari berbagai layanan *e-government* yang telah diterapkan dimana layanan tersebut merupakan suatu komitmen dalam memajukan pembangunan *e-government* di pemerintah kabupaten Polewali Mandar.

3.1.3 Kesiapan SDM di Pemerintah

1) Tingkat Keahlian

Untuk tingkat keahlian pegawai di pemerintah kabupaten Polewali Mandar penulis menilai cukup baik. Hal ini dikarenakan, SDM pada dinas Kominfo cukup mumpuni sesuai pada bidangnya masing-masing dan terkhusus pada yang mengurus *e-government* pun demikian dan SDM di dinas dukcapil juga cukup baik sebagai perangkat daerah pelayan masyarakat dalam memberikan layanan. Menurut penulis, kedua dinas tersebut memiliki peran yang cukup penting dalam penyelenggaraan *e-government* dan menciptakan *Smart Governance* oleh karenanya dengan menunjukkan hasil yang positif pada keahlian SDM di kedua dinas tersebut sudah cukup menilai bagaimana kondisi SDM di pemerintah dalam hal ini mewujudkan *Smart Governance*.

2) Tingkat Kompetensi

Kualitas SDM dinas kominfo-SP sebagai *leading sector* penerapan *e-government* cukup mumpuni dimana rata-rata ialah seorang sarjana yang berkompeten pada bidangnya selain itu dinas Dukcapil Polewali Mandar yang mana merupakan salah satu dinas pelayanan publik juga memiliki kondisi tingkat pendidikan pegawai yang cukup baik dimana kebanyakan diantaranya ialah lulusan Strata 2 atau S2 meskipun tidak sedikit diantaranya yang lulusan SLTA. Sehingga tingkat kompetensi SDM di pemerintah dapat penulis katakan tergolong baik.

3.1.4 Ketersediaan Dana dan Anggaran

1) Biaya Pemeliharaan

Biaya pemeliharaan di dinas kominfo-SP Polewali Mandar dalam mewujudkan

keberhasilan *e-government* telah tercapai dengan baik dimana anggaran pemeliharaan yang dikeluarkan dapat terealisasi dengan baik. Melalui pendekatan yang transparan dan akuntabel, Dinas Kominfo-SP memastikan bahwa setiap pengeluaran anggaran pemeliharaan diarahkan untuk mengoptimalkan kemajuan *e-government* dan pelayanan publik di Kabupaten Polewali Mandar.

2) Biaya Pengembangan

Dinas Kominfo-SP menunjukkan komitmen dalam mengelola anggaran dengan sebaik-baiknya untuk mendukung kesiapan *e-government* di pemerintah kabupaten Polewali Mandar.

3) Biaya Operasional

Biaya operasional atau pengelolaan *e-government* oleh dinas Kominfo-SP terkait telah tercapai dengan baik tanpa kendala. Semua biaya operasional ini dikelola dengan cermat dan terukur untuk memastikan alokasi dana yang efisien dan optimal, serta untuk menjaga kelancaran dan kualitas layanan *e-government* yang disediakan kepada masyarakat Kabupaten Polewali Mandar.

3.1.5 Perangkat Hukum

1) Peraturan Presiden

Untuk perangkat hukum terkait pelaksanaan *e-government* berdasar pada peraturan Pusat yaitu Peraturan Presiden (Perpres.) Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sehingga hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan *e-government* memenuhi standar kebijakan karena memiliki peraturan atau perangkat hukum yang melegalisasi untuk dilaksanakan yakni Perpres Nomor 95 Tahun 2018 yang menjadi perangkat hukum induk pelaksanaan *e-government* di Indonesia.

2) Instruksi Presiden

Adapun Instruksi presiden terkait kebijakan *e-government* telah dikeluarkan terlebih dahulu yaitu Instruksi presiden nomor 3 Tahun 2003 dan barulah dikeluarkan Peraturan Presiden terkait SPBE yang berdasar pada Inpres tersebut yang tertuang kedalam Perpres. Nomor 95 Tahun 2018.

3) Peraturan Bupati

Untuk regulasi pelaksanaan SPBE di kabupaten Polewali Mandar sudah ada dan tertuang di dalam Perbup Polewali Mandar No. 19 Tahun 2022 dimana merupakan tindak lanjut dari peraturan presiden no. 95 Tahun 2018 tentang SPBE. Sehingga, hal ini menunjukkan telah tercapai ditandai dengan adanya peraturan setingkat daerah atau pemerintah kabupaten atas kebijakan pelaksanaan *e-government* yaitu Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 19 tahun 2022.

3.1.6 Perubahan Paradigma

1) Cara Berfikir

Cara berfikir setiap individu setelah diterapkannya pemanfaatan TIK khususnya sistem pemerintahan berbasis elektronik atau *e-government* untuk pimpinan

instansi dinas Kominfo-SP Polewali Mandar mulai dari Kepala Dinas hingga Kepala Bidang mengalami perubahan cara berfikir yang berbeda dan visioner hal ini dikarenakan *e-government* mempunyai prinsip efektif dan efisien ,begitu juga dengan para pegawai dan masyarakat yang juga berpikir visioner ,mengedepankan efesiensi dan memahami keterampilan digital dimana mengambil sisi positif dari adanya perubahan paradigma yang terjadi mengingat pentingnya mengikuti perkembangan zaman namun tidak mengikuti arus.

2) Cara Kerja

Telah terjadi perubahan paradigma mengenai cara kerja yang terjadi semenjak adanya digitalisasi di dunia pemerintahan utamanya di pemerintah kabupaten Polewali Mandar dimana dinas Kominfo-SP yang menjadi *leading sector* dalam pemberian layanan dalam dunia pemerintahan yang memanfaatkan TIK.

3) Bersikap

Seluruh pegawai dinas Kominfo-SP menerima perubahan dengan terbuka dan mengambil langkah progresif. Meskipun dengan segala ketidakpastian akan perubahan yang terjadi tetapi, dinas Kominfo-SP senantiasa memandang perubahan adalah potensi yang harus dimanfaatkan. Hal ini menandakan bahwa cara bersikap pegawai dan masyarakat terhadap perubahan paradigma dalam menghadapi *e-government* atau SPBE sudah tergolong baik.

4) Berperilaku

Terjadi perubahan cara berperilaku pegawai dalam menjalankan sistem pemerintahan. Semenjak diterapkannya *e-government*, pegawai pemerintah khususnya pegawai dinas Kominfo-SP yang bergerak sebagai *leading sector e-government* menjadi aktif, responsive, dan akuntabel dalam bekerja serta lebih responsive dari sebelumnya. Sehingga dapat dikatakan bahwa pada indicator ini telah tercapai dengan baik

5) Kebiasaan Sehari-hari

Dengan adanya tuntutan *e-government* di pemerintah kabupaten Polewali Mandar yang memaksa untuk merubah kebiasaan sehari-hari. Contoh kebiasaan-kebiasaan buruk pegawai seperti terlambat, bolos dan lain-lain bisa teratasi dengan adanya teknologi yang dimanfaatkan seperti aplikasi E-ABSENSI POLMAN dan teknologi FINGERPRINT di setiap kantor

3.2 Smart Governance di Kabupaten Polewali Mandar

3.2.1 Partisipasi Dalam Pengambilan Keputusan

1) Partisipan

Partisipan atau pelaksana *e-government* di Polewali Mandar tidak hanya dilaksanakan antar pemerintah dalam hal ini perangkat daerah dan masyarakat umum tetapi juga melibat kelompok-kelompok atau tim relawan TIK yang terbentuk atas kemauan dari organisasi-organisasi pemuda maupun relawan TIK yang dibentuk Kominfo atas perintah dari pemerintah kabupaten Polewali Mandar.

2) Tingkat Partisipasi

Tingkat partisipasi konsumen atau masyarakat dalam pengambilan keputusan pada konteks *e-government* masih tergolong rendah, hal ini terbukti di beberapa platform digital masyarakat yang berpartisipasi terlihat jauh lebih sedikit dari populasi masyarakat Polewali Mandar. Akan tetapi, dari sekian banyaknya yang berpartisipasi pada platform *e-government* seperti PPID mereka Puas atas layanan yang diberikan.

3) Frekuensi Partisipasi

Adapun frekuensi partisipasi dalam implementasi *Smart Governance* menunjukkan hasil yang baik dimana partisipasi baik itu dari masyarakat dan stakeholder pemerintah telah dilibatkan dalam setiap pengambilan keputusan seperti pada kegiatan sosialisasi dan rapat musrembang.

3.2.2 Pelayanan Publik dan Sosial

1) Ketersediaan Layanan

Dalam menerapkan *Smart Governance* di kabupaten Polewali Mandar tentunya pemerintah menyediakan berbagai layanan aplikasi berbasis website atau sistem informasi yang dikelola oleh Dinas Kominfo-SP kabupaten Polewali Mandar sebagai *leading sector*. Selain itu dari segi pelayanan publik, dinas Dukcapil Polewali Mandar memiliki layanan seperti layanan JEBOL (jemput bola) dan layanan online yang telah diterapkan.

2) Ketersediaan Infrastruktur

Ketersediaan infrastruktur layanan public dan sosial sudah cukup baik, hanya saja kekurangan ruangan atau bangunan *command centre* yang menjadi pusat koordinasi dan pemantauan. Sehingga, ketersediaan infrastruktur pada layanan public dan sosial *Smart Governance* di kabupaten Polewali Mandar dinilai sudah tercapai dengan baik namun belum dapat dimaksimalkan dikarenakan masih ada infrastruktur yang belum tercapai untuk menciptakan *Smart Governance* atau tata kelola pemerintah yang cerdas.

3.2.3 Transparansi Pemerintah

1) Keterbukaan Informasi

Keterbukaan informasi di kabupaten Polewali Mandar dengan informan menunjukkan bahwa sudah berjalan dengan baik yaitu dengan memanfaatkan sarana-prasarana yang ada serta infrastruktur IT yang sudah digunakan sebagaimana mestinya terbukti dengan adanya layanan sistem informasi dan media-media penyeberan informasi lainnya seperti baligho dan videotron di Kabupaten Polewali Mandar.

2) Transparansi

Pemerintah telah menyediakan wadah untuk menyampaikan informasi seputar polewali mandar dari berbagai aspek secara transparansi yaitu melalui media sosial. Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian kabupaten

Polewali Mandar memiliki bidang yang mengelola informasi dan menyampaikannya ke publik. Informasi tersebut disampaikan baik melalui media sosial instagram, facebook, dan youtube serta website pemerintah kabupaten.

3) Akuntabilitas

Akuntabilitas dinas Kominfo-SP kabupaten Polewali Mandar punya regulasi dan standard atau target kinerja yang saat ini sudah berjalan dengan baik. Hal tersebut terbukti dari hasil capaian kinerja dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian kabupaten Polewali Mandar tahun 2023 yang menunjukkan bahwa saasaran strategis yang terdiri dari kualitas keterbukaan informasi public, kapabilitas dan fungsi teknis pemerintahan berbasis elektronik, kualitas data statistik sektoral, kualitas tata kelola pemerintahan, dan Perangkat Daerah telah terealisasi dengan rata-rata keseluruhan sebesar 106,19%.

3.2.4 Strategi dan Perspektif Politik

1) Strategi *Smart Governance*

Strategi *Smart Governance* kabupaten Polewali Mandar saat ini telah berjalan dan masih berpedoman pada misi ke-4 kabupaten Polewali Mandar yaitu memantapkan tata kelola pemerintahan yang berkualitas dan modern hal ini dikarenakan belum ada masterplan atau kebijakan *Smart City* yang diterapkan di kabupaten Polewali Mandar.

2) Kebijakan *Smart Governance*

Smart Governance merupakan komponen utama dalam penerapan *Smart City* namun pencanangan *Smart City* di Polewali Mandar masih sebatas wacana. Dasar kebijakan *Smart Governance* di Kabupaten Polewali Mandar adalah Perpres Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE dan selanjutnya diturunkan menjadi Perbup Polewali Mandar Nomor 19 Tahun 2022 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

3.3 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Penelitian ini memiliki dua fokus yaitu kesiapan *e-government* pemerintah dan implementasi atau penerapan smart governance di Polewali Mandar. Penerapan *e-government* di pemerintah kabupaten Polewali Mandar telah berjalan dengan baik meskipun belum sepenuhnya sempurna. Kemudian penerapan smart governance di Kabupaten Polewali Mandar sudah berjalan dengan baik dimana pemerintah diwakili oleh Dinas Kominfo-SP, Dinas Dukcapil, dan Bappeda-Litbang telah menunjukkan hasil positif. Temuan pentingnya ialah dalam menerapkan smart governance diperlukan kerjasama antar instansi atau stakeholder pemerintah daerah guna menciptakan tata kelola pemerintah yang baik, sama halnya dengan penelitian ini yang tidak hanya berfokus pada 1 lokasi perangkat daerah saja melainkan di beberapa perangkat daerah seperti dinas Kominfo-SP sebagai *leading sector e-government* yang mampu menunjang proses smart governance, Dinas Dukcapil sebagai bentuk implementasi layanan public kepada masyarakat yang mana merupakan prinsip dasar dari smart governance, dan Bappeda-Litbang sebagai badan yang merencanakan rancangan pembangunan daerah. Ketiga

instansi tersebut sama-sama saling berkontribusi untuk memberikan berbagai layanan, informasi, dan kebutuhan masyarakat lainnya untuk kemajuan daerah dalam menciptakan Smart Governance.

Smart Governance dan *e-government* memiliki hubungan yang erat yang terletak pada pemanfaatan teknologi informasi dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga *e-government* yang baik dapat menunjang tata kelola pemerintah yang cerdas atau smart governance.

IV. KESIMPULAN

1. Simpulan dari penelitian tentang kesiapan *e-government* di pemerintah kabupaten Polewali Mandar Berdasarkan Teori Indrajit (2005) adalah sebagai berikut:

Kabupaten Polewali Mandar telah menunjukkan kesiapan yang memadai dalam mengimplementasikan *e-government* di lingkup pemerintah kabupaten Polewali Mandar, didukung oleh beberapa faktor kunci.

Ditinjau dari segi infrastruktur telekomunikasi, kabupaten Polewali Mandar dinilai cukup memadai, namun perlu perluasan jaringan internet dan memerlukan command center. Pemerintah kabupaten saat ini tengah berupaya untuk menyelesaikan proses infrastruktur utamanya telekomunikasi agar masyarakat Polewali Mandar dapat merasakan jaringan internet dengan baik.

konektivitas TI oleh pemerintah telah berjalan dengan baik dan efektif. Ditinjau dari segi pelayanan, pembangunan, maupun pemberdayaan telah berjalan dengan baik dimana pemerintah telah memanfaatkan teknologi informasi.

Apabila melihat kesiapan sumber daya manusia dalam penerapan *e-government*, pemerintah kabupaten Polewali Mandar cukup mumpuni dan memadai dalam setiap bidangnya dan sesuai pada tiap kompetensi dan keahliannya.

Ketersediaan anggaran pemerintah kabupaten Polewali Mandar dalam penerapan pemerintahan berbasis elektronik yang cukup memadai untuk mendukung pengelolaan, pengembangan dan pemeliharaan *e-government*.

Dari segi Perangkat hukum, Polewali Mandar memiliki berpedoman pada Perpres No. 95 Tahun 2018 Tentang SPBE, Inpres. No. 3 Tahun 2018 tentang kebijakan *e-government*, dan di ranah daerah sendiri memiliki peraturan bupati yaitu Perbup. Polewali Mandar No. 19 Tahun 2022 tentang pedoman penyelenggaraan SPBE.

Terjadi perubahan paradigma yang positif dimana masyarakat dan pemerintah mau menggunakan dan menerima teknologi dalam kehidupan sehari-hari dan dalam penyelenggaraan pemerintahan sehingga hal ini menunjukkan bentuk kesiapan untuk beralih ke model *e-government*.

1. Penulis juga melakukan penelitian tentang smart governance di kabupaten

Polewali Mandar berdasarkan teori Giffinger (2007), berikut kesimpulan dari hasil penelitiannya:

Dilihat dari sisi partisipasi masyarakat, dimana partisipasi masih belum maksimal karena kurangnya sosialisasi dan pemahaman masyarakat mengenai kebijakan pemerintah terkait implementasi smart governance.

Layanan publik dan sosial Pemerintah kabupaten Polewali Mandar sudah menerapkan sistem layanan online dan layanan face to face yang bersifat jemput bola yang cukup memadai, namun masih terdapat infrastruktur yang masih diperlukan seperti command centre agar memudahkan proses koordinasi, pemantauan dan evaluasi.

Mengenai transparansi pemerintahan, pemerintah kabupaten Polewali Mandar telah maksimal dalam upaya memenuhi kebutuhan informasi masyarakat dan kini Polewali Mandar menuju kabupaten dengan predikat informatif.

Dalam perspektif dan strategi politik, belum ada regulasi tentang kebijakan resmi atau masterplan *Smart City* di Kabupaten Polewali Mandar yang dimana merupakan peraturan induk pelaksanaan Smart Governance, sehingga membuat penerapan Smart Governance di kabupaten Polewali Mandar belum maksimal.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu yang dapat dikatakan cukup singkat. Penelitian juga hanya dilakukan di satu kabupaten saja yaitu kabupaten Polewali Mandar pada 3 perangkat daerah saja dan penulis hanya membahas beberapa masalah dalam penelitian tersebut.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan kesiapan *e-government* di pemerintah kabupaten Polewali Mandar agar mendapatkan hasil yang lebih mendalam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Serang beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, dan seluruh pihak yang membantu dan mendoakan pelaksanaan penelitian sehingga penelitian ini dapat berjalan dengan sukses.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Nento, F., Nugroho, L. E., & Selo. (2017). Model E-Readiness Untuk Pengukuran Kesiapan Pemerintah Daerah Dalam Penerapan Smart Government : Studi Kasus Pemerintah Provinsi Gorontalo. *Seminar Nasional Inovasi Dan Aplikasi Teknologi Di Industri (SENIATI)*, B27.1-6.
- Pereira, G. V., Parycek, P., Falco, E., & Kleinhans, R. (2018). *Smart Governance in the context of smart cities: A literature review. Information Polity*, 23(2),

- 143-162. <https://doi.org/10.3233/IP-170067>
- Ridhawati, Eka, et al. 2019. "Penerapan E-Government Pada Pekon Sukamulya (Studi Kasus: Pekon Sukamulya Pringsewu)". *Jurnal Cendikia* 17.1 April : 246-250
- Gil-garcia, J. R. (2012). Understanding Smart Cities : An Integrative Framework, (June 2015) <https://doi.org/10.1109/HICSS.2012.615>
- Wahyuni, et. al. 2021. *Strategi Implementasi Smart Governance di Kota Makassar* (Vol. 7)
- Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1503 Tahun 2021 Tentang Hasil Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah Tahun 2021, 2021. Jakarta: Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia
- Surdin, J. (2016). Analisis Kelayakan Implementasi *E-government* Dalam Pelayanan Publik Di Bidang Keagrariaan Di Kabupaten Pinrang. *Jurnal Komunikasi KAREBA*, 5(1). <https://doi.org/10.31947/kjik.v5i1.1892>
- Amalia, E., & Lorita, E. (2022). Analisis Evaluasi Pengembangan *E-government* di Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bengkulu. Professional: *Jurnal Komunikasi Dan Administrasi Publik*, 9(1), 83–90. <https://doi.org/10.37676/professional.v9i1.2469>
- Syarifah, S., Muksin, D., & Fadlan, M. (2023). Analisis Faktor Implementasi *E-government* Di Kabupaten Jayawijaya Papua. *Journal of Social Politics and Governance (JSPG)*, 5(2), 199-210. <https://doi.org/10.24076/jspg.v5i2.1478>
- Avianto, B. N., Ismowati, M. ., & Amelia, N., (2022). Implementation *E-government* in supporting of online-based Service Quality and Accessibility. *Journal Research of Social Science, Economics, and Management*, 2(5), 729 –. <https://doi.org/10.59141/jrssem.v2i05.317>
- Bungin, B. (2022). *Post-Qualitative Social Research Methods*. (Jakarta: KENCANA) 6
- Randang, D. M., Djani, W., & Rani, L. S., (2020). Analisis Kesiapan Pemerintah Kabupaten Manggarai Dalam Penerapan *E-government*. *Jurnal Administrasi dan Demokrasi*, 1(1), 48-59. <https://doi.org/10.35508/jad.v1i1.3568>
- Waheduzzaman, W., & Miah, S. J. (2015). Readiness assessment of *e-government*: a developing country perspective in Bangladesh. *Transforming Government: People, Process and Policy*, 9(4), 498-516. <https://doi.org/10.1108/TG-05-2014-0018>
- Afrizal, Sarika, et al., (2015). Analisis Kesiapan Implementasi *E-government* Pada Direktorat Jendral Penyelenggaraan Haji Dan Umrah Kementerian Agama Republik Indonesia. *Jurnal Sistem Informasi*, 11(2), 2, doi:10.21609/jsi.v11i2.429.
- Subhan, & Budy Pratama, A. (2019). Kesiapan Desa Dalam Penerapan *E-government* (Studi Perbandingan di Desa Semaya dan Desa Pegirangan Kabupaten Pematang). *SAWALA: Jurnal Administrasi Negara*, 7(2), 161–175.